

TESIS

**KONSEP *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH DI UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



YANUARIUS PEGAU

215214473

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Yanuarius Pegau

Nomor Mahasiswa : 215214473

Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan

Judul Tesis : PENERAPAN KONSEP *COLLABORATIVE GOVERNANCE*
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Disetujui oleh:

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

1. Dr. W. Riawan Tjandra,
S.H., M. Hum.

28/3/2025

2. Dr. Hyronimus Rhiti,
S.H., LL. M.

24/3/2025



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Yanuarius Pegau
Nomor Mahasiswa : 215214473
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : *KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA*

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 9 April 2025

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr.W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	
2. Sekertaris	Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	
3. Anggota	Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.	

Ketua Prodi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penyelesaian tesis ini bisa berhasil karena penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu mencurahkan segala berkat dan rahmat yang luar biasa kepada saya sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Y Triyana, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Dr. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesain tesis ini.
5. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesain tesis ini.
6. Para Dosen Penguji Tesis Ini yang menguji serta memberi masukan pada terhadap penyempurnaan penulisan tesis ini

7. Orang tua penulis, Bapak Alfonsus Pegau dan Ibu Katarina S. Jemian atas segala rasa cinta yang luar biasa kepada penulis. Terima atas motivasi, teguran dan doa yang senangtiasa diberikan kepada penulis. Tuhan memberkati.
8. Kakak Esry Pegau, Bona Pegau, Yuyun Pegau, Albertus Jangku dan keponakan Keino, Chester Cleo, Aurora, Elbert dan semua keluarga, terima atas segala doa dan dukungannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan caranya masing-masing membatu saya dalam proses penulisan tesis ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yanuarius Pegau

No. Mahasiswa : 215214473

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“KONSEP *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENAGDAAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 20 Maret 2025

Yang menyatakan:

Yanuarius Pegau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat secara teoritis	10
2. Manfaat secara praktis.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
 BAB II TINJUAN PUSTAKA	 25
A. Tinjauan Umum Collaborative Governance	25
1. Pengertian <i>Collaborative Governance</i>	25
2. Prinsip-Prinsip <i>Collaborative Governance</i>	27
3. Karakteristik <i>Collaborative Governance</i>	28
B. Tinjauan Umum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	29
1. Pengertian dan Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	29
2. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	30
C. Landasan Teori.....	32
1. Teori <i>Collaborative Governance</i>	32
2. Teori Hukum Kontrak/Perjanjian.....	33
D. Batasan Konsep	38
 BAB III CARA PENELITIAN	 40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Data Penelitian	41
1. Bahan hukum primer.....	42
2. Bahan hukum sekunder	43
D. Lokasi Penelitian.....	44

E.	Alat dan Cara Pengumpulan Data Penelitian	44
1.	Teknik studi kepustakaan	44
2.	Teknis wawancara	45
F.	Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	45
G.	Sistematika Laporan Penelitian	46
BAB IV PEMBAHASAN		50
A.	Penerapan Konsep <i>Collaborative Governance</i> dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta	50
B.	Kedala -Kendala Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta	68
C.	Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Penerapan Konsep <i>Collaborative Governance</i> dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta	75
BAB V PENUTUP		83
A.	Kesimpulan	83
B.	SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA		85

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Konsep *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta”. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep *collaborative governance*, kendala-kendala penerapan konsep *collaborative governance* serta upaya-upaya mengatasi kendala-kendala konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara secara langsung pihak UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta. Data penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis hukum dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ pemerintah kota Yogyakarta belum diterapkan secara maksimal. Penerapan konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta masih mengalami banyak kendala seperti kendala sumber daya baik kendala sumber daya manusia, anggaran maupun teknologi, benturan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif maupun perencanaan yang tidak terintegrasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu peningkatan sumber daya, perencanaan pengadaan yang terintegrasi atau matang, membangun komunikasi yang efektif, pembagian kewenangan yang jelas, meminimalisir benturan kepentingan, pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, meningkatkan kepercayaan dan komitmen Bersama serta pemberian sanksi yang tegas.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Kontrak Pengadaan barang/jasa pemerintah; Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)

ABSTRACT

This thesis is entitled “The Concept of Collaborative Governance in the Implementation of Public Procurement Contracts in the Goods/Services Procurement Work Unit (UKPBJ) of the Yogyakarta City Government.” This thesis aims to examine the application of the concept of collaborative governance, the obstacles to the application of the concept of collaborative governance and efforts to overcome the obstacles to the application of the concept of collaborative governance in the implementation of government goods/services procurement contracts in the UKPBJ of the Yogyakarta City Government. This research is a normative research with a statute approach and conceptual approach. The data source is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of laws and regulations, while secondary legal materials are obtained through literature studies and through direct interviews with UKPBJ Yogyakarta City Government. This research data was analyzed using the legal analysis method with a descriptive qualitative approach. The results showed that the application of the concept of collaborative governance in the implementation of government procurement contracts in the UKPBJ of the Yogyakarta city government has not been maximally implemented. The application of the concept of collaborative governance in the implementation of government goods/services contracts in the UKPBJ of the Yogyakarta City Government still experiences many obstacles such as resource constraints, both human resources, budget and technology constraints, conflicts of interest, ineffective communication and non-integrated planning. Some of the efforts made to overcome these obstacles are increasing resources, integrated or mature procurement planning, building effective communication, clear division of authority, minimizing conflicts of interest, proportional distribution of rights and obligations, increasing trust and commitment together and imposing strict sanctions.

Keywords: Collaborative Governance; Public Procurement Contract; Public Procurement Work Unit (UKPBJ).